

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Dasar Pembentukan**

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat merupakan salah satu bidang pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru yang dibentuk berdasarkan Perwali Kota Banjarbaru No.57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru. Dimana berdasarkan struktur tersebut Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat membawahi 2 seksi yaitu Seksi Operasi dan Pengendalian serta Seksi Kerjasama.

### **1.2 Visi dan Misi Kota Banjarbaru**

#### **a) Visi**

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang ( clarity of direction ). Visi juga menjawab permasalahan pembangunan daerah 1rimina strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, visi dalam RPJMD adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada pemilihan kepala daerah. Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah adalah kesesuaian dengan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan Tahap III Tahun 2010 tentang RPJD Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025 maka visi Kota Banjarbaru adalah ``Terwujudnya Banjarbaru sebagai Kota Empat Dimensi yang Mandiri dan Terdepan``.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Visi Kota Banjarbaru Tahun 20016-2021, yaitu :

**``TERWUJUDNYA KOTA BANJARBARU SEBAGAI KOTA PELAYANAN YANG BERKARAKTER``**

**KOTA PELAYANAN** adalah Kota yang memberikan pelayanan secara optimal kepada warga masyarakat dan yang berkunjung di Kota Banjarbaru.

**BERKARAKTER** terdiri atas dua aspek penting yaitu :

1. Sumber daya manusia yang berakter, yaitu terciptanya sumber daya manusia yang sehat, mempunyai etos kerja tinggi dan berakhlak mulia berdasarkan nilai-nilai relegius.
2. Kota yang berkarakter, yaitu sebuah kota yang mempunyai ciri khas sebagai kota yang tertata/ direncanakan ( urban design ) sehingga menjadi tempat hunian yang indah, aman dan nyaman yang berwawasan lingkungan.

## b) Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun dengan memperlihatkan 2rimin-faktor lingkungan strategis yang mempunyai serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langka yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Dalam merumuskan Misi Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 mengacu kepada RPJD Kota Banjarbaru dan Misi Kepala Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, maka ditetapkan Misi Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang tedidik, sehat, berdaya saling dan berakhlak mulia.
2. Meningkatkan penyediaan infrastruktur perkotaan yang merata, cerdas dan berwawasan lingkungan.
3. Memperkuat kemandirian, peningkatan kelembagaan dan peluang kewirausahaan.
4. Melaksanakan reformasi birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan 2rimin dan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi.
5. Memperkuat cipta kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tertib.

Berdasarkan tugas poko dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru untuk mendukung tercapainya visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru yaitu melaksanakan misi kelima `` ***Memperkuat Cipta Kondisi Masyarakat Yang Aman, Nyaman dan Tertib***``

Salah satu tujuan dari misi tersebut adalah mewujudkan guna mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketentraman pada masyarakat sehingga masyarakat merasa aman, nyaman dan tertib.

### 1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan perhitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah yang dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program-program.

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau

petunjuk dalam pelaksanaan program/ kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

#### **1.4 Program dan Kegiatan Daerah**

Program merupakan instrument kegiatan yang berisi kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri dari Program kegiatan daerah ( APBD Kota Banjarbaru ).

##### **a) Program**

Program dan kegiatan daerah yang dilaksanakan sebagai berikut :

##### **1) Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal**

Patroli Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

##### **a) Keluaran (Output) :**

- Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Penertiban PKL yang Kondusif dan Terarah
- Cakupan Pelaksanaan Penjagaan dan Pengamanan Pejabat dan Aset Daerah yang Kondusif dan Terarah

##### **b) Hasil (Outcome) :**

- Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Penertiban PKL yang Kondusif dan Terarah
- Cakupan Pelaksanaan Penjagaan dan Pengamanan Pejabat dan Aset Daerah yang Kondusif dan Terarah

##### **c) Manfaat ( Benefit ) :**

- Mencegah dan Meminimalisir terjadinya gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

##### **b) Kegiatan Daerah**

- a) **Kegiatan Patroli Lingkungan dan Pencegahan Tindak Kriminal** adalah merupakan tugas anggota Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja disalah satu pasalnya menjaga Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat dimana tugas 3rimin merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan guna mencegah terjadinya gangguan ketentraman pada masyarakat sehingga masyarakat merasa aman dan tentram dengan adanya 3rimin lingkungan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

- b) **Kegiatan Pengamanan Rutin Rumah Dinas dan Aset** adalah merupakan tugas anggota Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, dimana perlu dilakukan pengamanan terhadap Pejabat Negara/Daerah dan juga 4rimi-aset yang dimiliki Pemerintah Daerah.
- c) **Kegiatan Pengamanan Pejabat** adalah merupakan tugas anggota Satuan Polisi Pamong Praja dimana pada saat pejabat Negara/Daerah yang melakukan kunjungan disuatu tempat maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah melakukan pengamanan terhadap pejabat Negara/Daerah tersebut.

1.5     **Anggaran Keuangan**

No	Kode Rekening	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	5	BELANJA				
	5.2	BELANJA LANGSUNG				
	5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				
	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				
	5.2.2.01.20	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Komputer				
		- Catridge Printer	2.00	Buah	275.000	550.000
		- Refill/ Tinta Botol	8.00	Buah	90.000	720.000
2	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				
	5.5.2.06.02	Belanja Penggandaan				
		- Fotocopy	16.179	Lembar	200	3.235.800
3	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				
	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				
		- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Khusus Satpol PP	3.982	OH	80.000	318.560.000
		- Perjalanan Dinas Pengamanan Rutin Rumah Dinas dan Aset	4.478	OH	80.000	358.240.000
		- Perjalanan Dinas Pengamanan Pejabat	900	OH	80.000	72.000.000
JUMLAH						753.305.800

## **BAB II**

### **SEKSI OPERASI DAN PENGENDALIAN**

#### **2.1 Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf d Perwali Kota Banjarbaru No.57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru, yaitu Bidang Ketertiban Umum & Ketentraman Masyarakat terdiri dari :

- 1. Seksi Operasi Dan Pengendalian**
2. Seksi Kerjasama

Peraturan Walikota Banjarbaru No 57. Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Kepala Satuan,Sekretaris,Kepala Bidang,Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru Pasal 11 yaitu :

- (1) Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas pokok dan fungsi pelaksanaan operasi dan pengendalian terhadap masyarakat,aparatur dan badan hukum dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Uraian tugas Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian adalah :
  - a. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran serta teknis dan jadwal kegiatan seksi operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan Kepala Bidang;
  - b. Menyenggarakan pelaksanaan pemberian peringatan dan teguran pra operasi penertiban,pembongkaran,penutupan dan penyegelan;
  - c. Menyenggarakan kegiatan deteksi dini potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum sebelum dilaksanakan penindakan;
  - d. Menyenggarakan kegiatan pemetaan/*mapping* terhadap objek atau lokasi sasaran serta *emergency exit window*;
  - e. Menyenggarakan kegiatan operasi penertiban, pembongkaran, penutupan dan penyegelan;
  - f. Menyenggarakan kegiatan patroli ketentraman dan ketertiban;
  - g. Mengendalikan patroli ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan oleh unit pelaksana Satpol PP Kecamatan;
  - h. Menyenggarakan kegiatan pengawalan dan pengamanan pejabat;
  - i. Menyenggarakan kegiatan pengamanan aset dan tempat-tempat penting;
  - j. Menyenggarakan pembuatan laporan hasil kegiatan patroli untuk ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan penyidikan oleh bidang terkait;

- k. Memonitoring dan mengevaluasi pencapaian target-target kinerja dan anggaran dalam lingkup seksi operas dan pengendalian;
- l. Mengonsep, memparaf dan mengoreksi surat, telahaan dan administrasi lainnya untuk kelancaran kegiatan seksi operasi dan pengendalian;
- m. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing;
- n. Memonitoring dan mengevaluasi serta menilai tugas bawahan
- o. Membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam kedinasan.

**2.2 Data Umum Pegawai Pada Seksi Operasi dan Pengendalian**

Jumlah Pegawai pada Seksi Operasi dan Pengendalian secara keseluruhan berjumlah

No.	Nama / NIP / NRTK	Pangkat / Gol	Jabatan
1.	Abdullah, S.Sos NIP. 19630404 198703 1 016	IV/a	Kabid Tibum dan Tranmas
2.	M. Rasyid Wahyuni, Sos NIP. 19700903 200901 1 001	III/c	Kasi Operasi dan Pengendalian
3.	Yanto Hidayat, SE NIP. 19710813 200604 1 016	III/b	Pejabat Fungsional Pol PP Ahli Pertama / PPNS
4.	Muhammad Ruslie, SE NIP. 19710906 200604 1 017	III/b	Pejabat Fungsional Pol PP Ahli Pertama / PPNS
5.	Zulkipli Fahriyanoor, SH NIP. 19751214 200701 1 008	III/a	Pejabat Fungsional Pol PP Terampil / Lanjutan
6.	Ari Nispuadi NIP. 19780706 200901 1 001	II/c	Pejabat Fungsional Pol PP Terampil / Pelaksana
7.	Ahmad Rosyadi NIP. 19760504 200701 1 012	II/b	Pejabat Fungsional Pol PP Terampil / Pelaksana
8.	Herry Suriana NIP. 19761010 201406 1 001	II/b	Staf Pelaksana Operasi dan Pengendalian
9.	Natalia Yanto, SE NRTK. 011.85.07	-	Staf Pelaksana Operasi dan Pengendalian
10.	M. Dadang Kurniwan, SH NRTK. 017.88.07	-	Staf Pelaksana Operasi dan Pengendalian
11.	Yogi Sam Isnantha, SE NRTK. 231.87.08	-	Staf Pelaksana Operasi dan Pengendalian
12.	Bahrn NRTK. 123.68.09	-	Staf Pelaksana Operasi dan Pengendalian
13.	Hendri Fauzi, SP NRTK. 017.84.12	-	Staf Pelaksana Operasi dan Pengendalian
14.	Khairil Anwar NRTK. 023.84.12	-	Staf Pelaksana Operasi dan Pengendalian
15.	Riky Bayu Saputra NRTK. 002.96.14	-	Staf Pelaksana Operasi dan Pengendalian

**Standby Khusus Seksi Operasi dan Pengendalian**

No	Nama/NIP/NRTK	Gol/Pangkat	Jabatan
1.	Rahyadi Jaya NIP. 19700510 200003 1 006	III/a	Kordinator Lapangan Standby Khusus
2.	M. Sya`rani NIP. 19701017 200701 1 013	II/c	Danru Standby Khusus
3.	M. Falahi NIP. 19770305 201001 1 001	II/c	Wadanru Standby Khusus
4.	Rifansyah NRTK. 019.85.07	-	Anggota Standby Khusus
5.	Saryono NRTK. 095.86.10	-	Anggota Standby Khusus
6.	Gatot	-	Anggota Standby Khusus

	NRTK. 092.68.10		
7.	M. Aqli Akbar NRTK. 137.88.12	-	Anggota Standby Khusus
8.	Ari Adenanthera NRTK. 015.88.12	-	Anggota Standby Khusus
9.	Delly seto Herlambang, SP NRTK. 924.72.12	-	Anggota Standby Khusus

**Anggota Piket Seksi Operasi dan Pengendalian**

No	Nama/NIP/NRTK	Gol/Pangkat	Jabatan
1.	Ahmadianoor NIP. 19731025 200604 1 012	II/c	Komandan Piket
2.	M. Syarkani NIP. 19790618 200701 1 004	II/c	Danru
3.	Ferry Irawan NIP. 19750323 200604 1 021	II/c	Anggota Piket
4.	Aji Tiowarman NIP. 19780109 200701 1 007	II/c	Anggota Piket
5.	Gunawan NIP. 19770610 200901 1 003	II/b	Anggota Piket
6.	Kamaruddin NIP. 19720211 200901 1 002	II/b	Anggota Piket
7.	M. Abdi NIP. 19660908 200701 1 021	II/b	Anggota Piket
8.	Teddy Suherman NIP. 19821021 200901 1 001	II/b	Anggota Piket
9.	Andy Kusuma Saputra, SE NRTK. 006.89.07	-	Anggota Piket
10.	Eko Saputra Nurdiansyah, SH NRTK. 002.88.07	-	Anggota Piket
11.	Isak Methias NRTK. 009.86.07	-	Anggota Piket
12.	M. Anshari NRTK. 007.84.07	-	Anggota Piket
13.	Ifan Mahlani NRTK. 008.84.07	-	Anggota Piket
14.	Rahmat Santoso NRTK. 004.86.07	-	Anggota Piket
15.	Fahrijuni NRTK. 016.78.07	-	Anggota Piket
16.	Iis Sugianto NRTK. 229.81.08	-	Anggota Piket
17.	Rahmat NRTK. 230.89.08	-	Anggota Piket
18.	Yuan Setiawan NRTK. 057..82.10	-	Anggota Piket
19.	M. Ali Machmudi NRTK. 404.81.09	-	Anggota Piket
20.	M. Shal'ah NRTK. 094.86.10	-	Anggota Piket
21.	Harijadi, S.Sos NRTK. 076.71.09	-	Anggota Piket
22.	Saini NRTK. 044.77.10	-	Anggota Piket
23.	Siswandi NRTK. 012.81.12	-	Anggota Piket
24.	Sajidin NRTK. 075.89.09	-	Anggota Piket
25.	Machmud NRTK. 030.73.10	-	Anggota Piket
26.	Fathony Akbar NRTK. 031.80.11	-	Anggota Piket
27.	Sabul Muhtar NRTK. 045.80.12	-	Anggota Piket
28.	Toto Purwanto NRTK. 034.75.12	-	Anggota Piket

29.	Khamarudin NRTK. 043.89.12	-	Anggota Piket
30.	M. Fahrian Nur NRTK. 005.89.14	-	Anggota Piket
31.	M. Albarkah NRTK. 013.88.12	-	Anggota Piket
32.	Ahmad Fuad NRTK. 021.75.12	-	Anggota Piket
33.	Berani NRTK. 035.85.12	-	Anggota Piket

**Anggota Satpol PP Kecamatan**

No	Nama/NIP/NRTK	Gol/Pangkat	Jabatan
1	Juliyono, SE NIP. 19740807 200604 1 011	III/b	Anggota Kecamatan
2	Mahyudin NIP. 19740702 200604 1 014	II/d	Anggota Kecamatan
3	Sigit Wastanto NIP. 19710509 200604 1 014	II/d	Anggota Kecamatan
4	Racmad Redian NIP. 19760511 200701 1 005	II/c	Anggota Kecamatan
5	Hamdani NIP. 19790511 200701 1 011	II/c	Anggota Kecamatan
6	M. Taufik Rahman NIP. 19770225 200901 1 001	II/a	Anggota Kecamatan
7	A. Adi Anshari NIP. 19781024 200901 1 001	II/c	Anggota Kecamatan
8	Mardiyanto NIP. 19760624 200701 1 015	II/c	Anggota Kecamatan
9	Reswa NRPTT. 078.014.501	-	Anggota Kecamatan
10	M. Indra Abdul Rakim NRTK. 368.91.09	-	Anggota Kecamatan

BAB III

KEGIATAN SEKSI OPERASI DAN PENGENDALIAN

3.1

Kegiatan Daerah Seksi Operasi dan Pengendalian

- a) Kegiatan Patroli Lingkungan dan Pencegahan Tindak Kriminal
- Kegiatan Patroli khususnya Seksi Operasi dan Pengendalian dalam rangka memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan rasa aman, baik fisik maupun psikis, terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat oleh gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Kegiatan ini juga demi menegakan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru yaitu berupa pelanggaran PKL (pedagang Kaki Lima ), Reklame, THM (tempat hiburan umum), GEPENG (gelandangan dan pengemis), Anak Punk, Minuman Beralkohol, Obat-Obat Terlarang, Rumah Kost, Penginapan Hotel, Prostitusi, Warung Sakadup serta gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat lainnya.
- b) Kegiatan Pengamanan Rutin Rumah Dinas dan Aset
- Kegiatan pengamanan rutin rumah dinas dan aset khususnya Seksi Operasi dan pengendalian dalam rangka menjaga keamanan Kediaman Rumah Dinas, Kediaman Pejabat Daerah, serta Aset-aset daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Banjarbaru.
- c) Kegiatan Pengamanan Pejabat
- Kegiatan Pengaman Pejabat khususnya Seksi Operasi dan Pengendalian dalam rangka kegiatan preventif anggota Satpol PP Kota Banjarbaru untuk menjaga keamanan, keselamatan atas jiwa Pejabat Daerah.

3.2

Rencana Aksi Kegiatan

Tahapan Persiapan	Target Penyelesaian	Kriteria Keberhasilan	Hasil Kinerja	Target Kegiatan	Target Keuangan Pertriwulan
Patroli Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 1. Menyiapkan Surat Perintah Tugas (SPT) 2. Daftar Hadir - Perjalanan Dinas dalam Kota Khusus Satpol PP - Perjalanan Dinas Pengamanan Rutin Rumah Dinas dan Aset Khusus Satpol PP - Perjalanan	Periode Januari s/d April 2018 (Triwulan I)	Surat Perintah Tugas	Meminimalisir tumbuh kembangnya para PKL di wilayah (Kawasan) yang harus disterilkan sesuai SOP	54 Kegiatan	Rp. 79.639.000
		Laporan Hasil Kegiatan		5 Tempat	Rp. 89.559.000
		Dokumentasi		45 Kegiatan	Rp. 18.000.000
	Periode Mei s/d Juni 2018 (Triwulan II)		Selalu cepat dan tanggap dalam setiap melayani aduan masyarakat.	54 Kegiatan	Rp. 79.640.000
				5 Tempat	Rp. 89.560.000
				45 Kegiatan	Rp. 18.000.000
	Periode Juli s/d September 2018 (Triwulan III)		Meminimalisir penyalahgunaan tempat kost-kostan, perhotelan dan	54 Kegiatan	Rp. 79.640.000
				5 Tempat	Rp. 89.560.000
				45 Kegiatan	Rp. 18.000.000

Dinas Pengamanan Pejabat 3. Melaksanakan Kegiatan Sesuai SPT 4. Laporan Kegiatan 5. Nota Pencairan Dana 6. Tanda Terima uang Kegiatan Perjalanan Dinas 7. Pengarsipan Laporan Kegiatan 8. Pembuatan SAKIP 9. Pembuatan laporan Kegiatan Tahunan	Periode Oktober s/d Desember 2018 (Triwulan IV)		penginapan oleh penghuninya.	54 Kegiatan	Rp. 79.640.000
			Meminimalisir (mengurangi) penyalahgunaan obat-obatan terlarang	5 Tempat	Rp. 89.560.000
				45 Kegiatan	Rp. 18.000.000
			Meminimalisir peredaran minuman keras(beralkohol ). • Meminimalisir praktek Prostitusi • Meningkatkan pelaksanaan penjagaan dan pengamanan Pejabat dan Aset daerah sesuai SOP • Menjamin rasa aman terhadap Pejabat		

### 3.3 Realisasi Kegiatan

#### a) Kegiatan Patroli Lingkungan dan Pencegahan Tindak Kriminal

Uraian	Target Kegiatan Per Triwulan	Realisasi Kegiatan	Capaian Realisasi Kegiatan Per Triwulan	Target OH	Realisasi OH	Capaian Realisasi OH Per Triwulan
Triwulan I	54	58	107 %	999,5	990	99 %
Triwulan II	54	67	124 %	999,5	996	99,6 %
Triwulan III	54	64	118 %	999,5	993	99,3 %
Triwulan IV	54	65	120,3%	999,5	1.003	100,3 %
Jumlah	216	254	117,5 %	3.982	3.982	100 %

#### b) Kegiatan Pengamanan Rutin Rumah Dinas dan Aset

Uraian	Target Kegiatan Per Triwulan	Realisasi Kegiatan	Capaian Realisasi Kegiatan Per Triwulan	Target OH	Realisasi OH	Capaian Realisasi OH Per Triwulan
Triwulan I	5 Tempat	5 Tempat	100%	1.119,5	1.114	99,5 %
Triwulan II	5 Tempat	5 Tempat	100%	1.119,5	1.094	97,7 %
Triwulan III	5 Tempat	5 Tempat	100%	1.119,5	1.114	99,5 %
Triwulan IV	5 Tempat	5 Tempat	100%	1.119,5	1.149	100,6 %
Jumlah	5 Tempat	5 Tempat	100%	4.478	4471	99,8 %

#### c) Kegiatan Pengamanan Pejabat

Uraian	Target Kegiatan Per Triwulan	Realisasi Kegiatan	Capaian Realisasi Kegiatan Per Triwulan	Target OH	Realisasi OH	Capaian Realisasi OH Per Triwulan
Triwulan I	45	36	80%	225	225	100 %
Triwulan II	45	28	62,2%	225	214	95,1 %
Triwulan III	45	45	100%	225	225	100 %
Triwulan IV	45	29	64,4	225	236	104,8 %
Jumlah	180	138	76,6%	900	900	100 %

3.4 Data Temuan Pelanggaran Perda Perbulan oleh Seksi Operasi dan Pengendalian Tahun 2018

Temuan Pelanggaran	Jan	Feb	Maret	Aprl	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
PKL	11	12	37	2	5	2	6	17	2	24	7	1
GEPENG	-	-	-	22	-	1	2	-	-	-	-	-
THM REKREASI & OLAHRAGA	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANAK PUNK	-	-	-	49	12	-	13	-	-	-	-	-
MINUMAN KERAS BERALKOHOL	4	-	7	2	4	3	1	4	5	9	7	-
OBAT-OBATAN TERLARANG DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
RUMAH KOST	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
PENGINAPAN HOTEL	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-
GANGGUAN TIBUM & TRANMAS	1	4	2	7	6	5	39	8	4	2	-	3
PERIZINAN USAHA & REKLAME	-	6	-	5	1	7	-	4	13	2	2	-
PROSTITUSI	-	-	6	1	3	-	-	1	1	2	9	2
WARUNG SAKADUP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAM PEJABAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	18	25	53	88	35	17	62	36	25	39	25	6

3.5 Data Seluruh Temuan Pelanggaran Perda Selama 1 Tahun oleh Seksi Operasi dan Pengendalian Tahun 2018

No	Temuan Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran Tahun 2018
1	PKL	126
2	GEPENG	25
3	THM REKREASI & OLAHRAGA	3
4	ANAK PUNK	74
5	MINUMAN KERAS BERALKOHOL	46
6	OBAT-OBATAN TERLARANG	1
7	RUMAH KOST	4
8	PENGINAPAN HOTEL	4
9	GANGGUAN TIBUM & TRANMAS	78
10	PERIZINAN USAHA & REKLAME	43
11	PROSTITUSI	25
12	WARUNG SAKADUP	-
13	PAM PEJABAT	-
JUMLAH		429

3.6 Realisasi Keuangan

No	Kode Rekening	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Realisasi Volume	Realisasi Keuangan	Sisa Keuangan	Realisasi %
1	5	BELANJA								
	5.2	BELANJA LANGSUNG								
	5.2.2	Belanja Barang dan Jasa								
	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis								
	5.2.2.01.20	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Komputer								
		- Catridge Printer	2.00	Buah	275.000	550.000	2.00	550.000	-	100 %
		- Refill/ Tinta Botol	8.00	Buah	90.000	720.000	8.00	720.000	-	100 %

2	5.2.2.06 5.5.2.06.02	Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan - Fotocopy	16.179	Lembar	200	3.235.800	200	3.235.800	-	100 %
3	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas								
	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah								
		- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Khusus Satpol PP	3.982	OH	80.000	318.560.000	3.982	318.560.000	-	100 %
		- Perjalanan Dinas Pengamanan Rutin Rumah Dina sedan Aset	4.478	OH	80.000	358.240.000	4.471	357.680.000	560.000	99,8 %
		- Perjalanan Dinas Pengamanan Pejabat	900	OH	80.000	72.000.000	900	72.000.000	-	100 %
JUMLAH								752.745.800	560.000	99,92 %

3.7 Dokumentasi



Foto.01 – Gangguan Tibum



Foto.02 – P K L



Foto.03 – Anak Punk



Foto.04 – Minuman Keras Beralkohol



Foto.04 – Lem Fox & Obat-obatan Terlarang



Foto.05 – Reklame



Foto.06 – Kos-kosan



Foto.07 – Penginapan



Foto.08 – GEPENG



Foto.09 – Ruang Terbuka Hijau



*Foto.10 – Tempat Hiburan Umum*



*Foto.11 – Piket Rumah Dinas Walikota*



*Foto.12 – Piket SET DPRD*



*Foto.13 – Piket Balai Kota*



*Foto.14 – Piket Kediaman Wakil Walikota*



*Foto.15 – Pengamanan Pejabat*



*Foto.16 – Piket Lobi Balai Kota*

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Satuan Polisi Pamong Praja kota Banjarbaru khususnya Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai penegakan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat

Dalam penegakan peraturan daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru banyak mempunyai kendala dalam penegakan peraturan daerah yaitu :

- a) Kurang anggaran kegiatan
- b) Kurang sarana dan prasarana khususnya mobil patroli dan prasana lainnya
- c) Kurangnya personil dilapangan, dimana tidak adanya petugas khusus penindakan dan petugas khusus pengamanan pejabat
- d) Banyaknya tenaga Satpol PP Kota Banjarbaru yang berstatus non PNS (tenaga kontrak) yang menjadi kurang efektifnya dalam penegakan Perda.
- e) Belum adanya kebijakan pemerintah daerah terhadap PKL dalam hal ( relokasi PKL atau tempat khusus )
- f) Belum sinerginya penyelesaian masalah/ kasus pelanggaran Perda Kota Banjarbaru dengan SKPD teknis di Pemerintah Kota Banjarbaru

### **4.2 Saran**

Agar tercapainya Program dan kegiatan daerah yaitu pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal untuk Pelaksanaan Kegiatan Penertiban PKL yang Kondusif dan Terarah serta Pelaksanaan Penjagaan dan Pengamanan Pejabat dan Aset Daerah yang Kondusif dan Terarah perlu adanya :

- a) Penambahan anggaran kegiatan
- b) Penambahan sarana dan prasana yaitu mobil patroli dan prasana lainnya
- c) Penambahan personil petugas khusus penindakan dan petugas khusus pengamanan pejabat
- d) Pemerintah Kota Banjarbaru diharapkan memberikan jalan yang terbaik masalah pengangkatan non PNS (tenaga kontrak) menjadi PNS pada khususnya anggota Satpol PP Kota Banjarbaru
- e) Pemerintah Kota Banjarbaru menyediakan tempat khusus relokasi PKL agar dapat tertata rapi
- f) Sosialisasi antar Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru dengan SKPD terkait perihal penyelesaian / kasus pelanggaran Perda dengan membentuk Tim Terpadu

Demikian laporan kegiatan ini dibuat agar kiranya dapat bermanfaat bagi seluruh pegawai ASN, Honorer, PTT dan Tenaga Kontrak Satuan Polisi Pamong Praja kota Banjarbaru untuk mewujudkan Kota Banjarbaru yang aman dan tertib serta terciptanya Banjarbaru yang Berkarakter.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT semesta alam, sehingga atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kegiatan Seksi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru Tahun 2018 dapat terselesaikan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari dari sempurna. Namun, semoga apa yang dituangkan didalamnya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang memerlukannya. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan laporan ini.

Diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik dalam pelaksanaan kegiatan maupun dalam penyelesaian laporan kegiatan ini.

Akhirnya semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pelaksanaan dan pembangunan kemajuan Seksi Operasi dan Pengendalian dan Seksi kerja sama di Satuan polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru.

Banjarbaru, 31 Desember 2018  
**Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian**

**M. Rasyid Wahyuni, S.Sos**  
NIP. 19700903 200901 1 001

DAFTAR ISI

Cover	.....	i
Kata Pengantar	.....	ii
<b>BAB I</b>	<b>Pendahuluan</b> .....	1
1.1	Dasar Pembentukan .....	1
1.2	Visi dan Misi Kota Banjarbaru .....	1
1.3	Strategi dan Arah Kebijakan .....	3
1.4	Program dan Kegiatan Daerah .....	3
1.5	Anggaran Keuangan .....	5
<b>BAB II</b>	<b>Seksi Operasi dan Pengendalian</b> .....	6
2.1	Tugas Pokok dan Fungsi .....	6
2.2	Data Umum Pegawai Pada Seksi Operasi dan Pengendalian .....	7
<b>BAB III</b>	<b>Kegiatan Seksi Operasi dan Pengendalian</b> .....	11
3.1	Kegiatan Daerah Seksi Operasi dan Pengendalian .....	11
3.2	Rencana Aksi Kegiatan .....	11
3.3	Realisasi Kegiatan .....	12
3.4	Data Temuan Pelanggaran Perda Perbulan oleh Seksi Operasi dan Pengendalian Tahun 2018 .....	13
3.5	Data Seluruh Temuan Pelanggaran Perda Selama 1 Tahun oleh Seksi Operasi dan Pengendalian Tahun 2018 .....	14
3.6	Realisasi Kasus .....	14
3.7	Realisasi Keuangan .....	15
3.8	Dokumentasi .....	16
<b>BAB IV</b>	<b>Penutup</b> .....	22
4.1	Kesimpulan .....	22
4.2	Saran .....	22

**LAPORAN KEGIATAN**  
**BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT**  
**SEKSI OPERASI DAN PENGENDALIAN**



Oleh :

**Seksi Operasi dan Pengendalian**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**KOTA BANJARBARU**  
**TAHUN 2018**

**.6 Realisasi Kasus**

No	Kasus	Perda	Jumlah Kasus
1	PKL	Perda No.6 Tahun 2006 Tentang Ketertiban Umum & ketwemntaran Masyarakat Pasal 12 "Setiap orang dilarang berjualan di trotoar atau bahu jalan, jalur hijau, taman atau fasilitas umum lainnya terkecuali dilokasi tertentu yang telah diizinkan Walikota sebagai tempat berusaha bagi PKL"	2
2	Minuman Keras / Beralkohol (Kemasan)	Perda No 5 Tahun 2006 tentang larangan minuman beralkohol Pasal 2 ayat (2) "Setiap orang atau badan (perusahaan) dilarang memproduksi, memasok, mengedar, mendatangkan, menyimpan minuman beralkohol / minuman keras dan atau minuman memabukan didalam wilayah Kota Banjarbaru"	5
3	Minuman Keras / Beralkohol (Jenis Tuak)	Perda No 5 Tahun 2006 tentang larangan minuman beralkohol Pasal 2 ayat (2) "Setiap orang atau badan (perusahaan) dilarang memproduksi, memasok, mengedar, mendatangkan, menyimpan minuman beralkohol / minuman keras dan atau minuman memabukan didalam wilayah Kota Banjarbaru"	7
4	Minuman Keras (Pengkonsumsi)	Perda No 5 Tahun 2006 tentang larangan minuman beralkohol Pasal 2 ayat (3) "Setiap orang dilarang mengkonsumsi / minuman keras atau beralkohol / etanol mengandung dan atau minuman yang memabukan didalam wilayah Kota Banjarbaru"	9
5	Prostitusi (Penyedia Jasa)	Perda No.6 tahun 2002 tentang pemberantasan pelacuran "Setiap orang atau badan dilarang menjadi pelacur dan melacur"	29
6	Prostitusi (Pemakai Jasa)	Perda No.6 tahun 2006 Tentang Ketertiban Umum & ketentraman Masyarakat Pasal 24 ayat (2) huruf C "Memakai jasa penjaja seks komersil"	4
7	Prostitusi (Penyedia Tempat)	Perda No.6 tahun 2002 tentang pemberantasan pelacuran Pasal 3 ayat (1) "Setiap orang atau badan dilarang menyediakan rumah atau tempat untuk kegiatan perbuatan pelacuran"	1
<b>JUMLAH</b>			<b>57</b>

Realisasi kasus pelanggaran perda sebanyak **57** kasus untuk mengikuti Sidang Tipiring. Kasus tersebut sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Kota Banjarbaru, dan mendapat putusan Ingkrah dari Pengadilan Negeri Kota Banjarbaru.